BUKU AJAR

DASAR - DASAR ILMU POLITIK

A.JUNAEDI KARSO

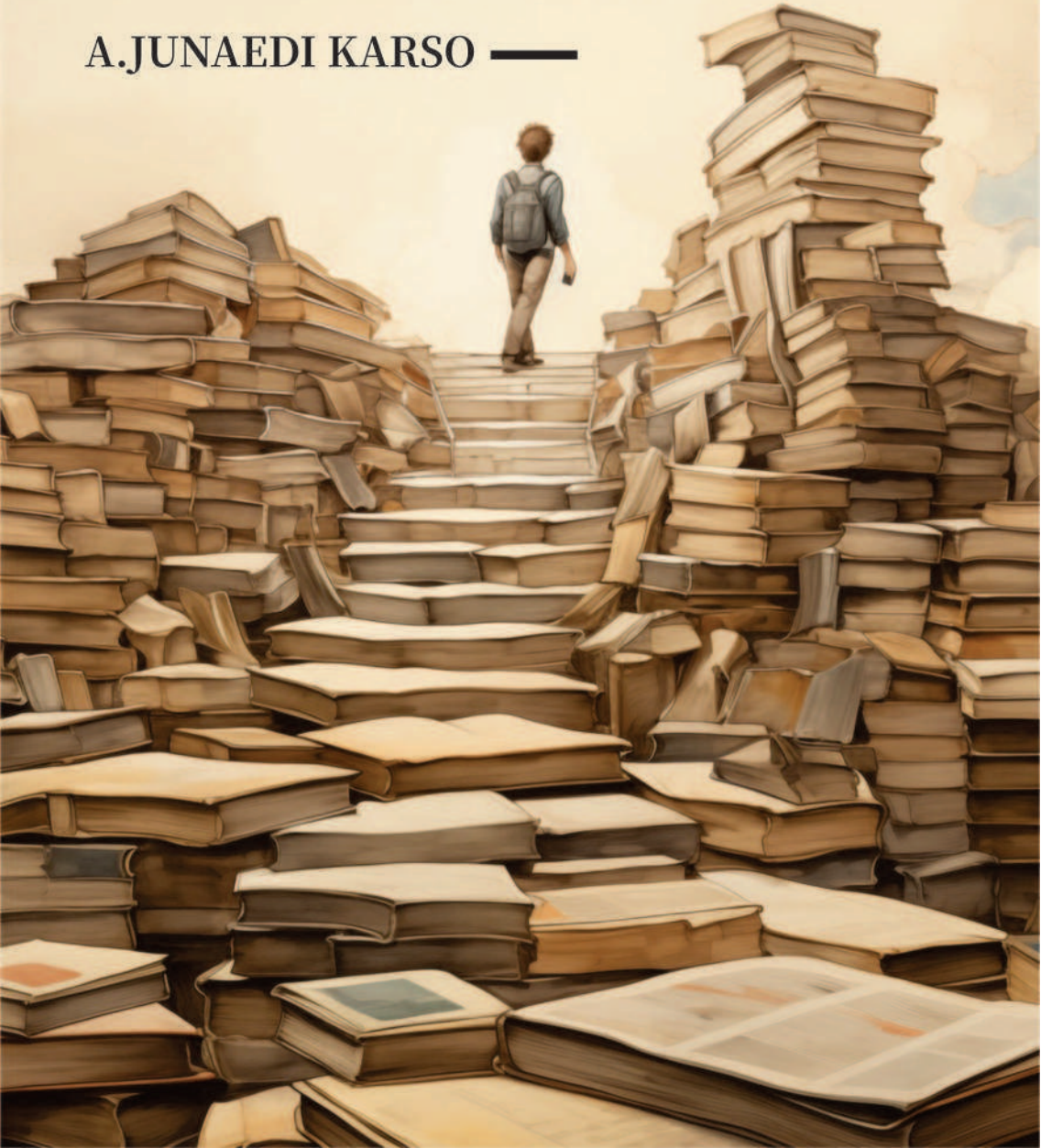

Tentang Penulis

A.JUNAEDI KARSO

Junaedi (A. Junaedi Karso) was born in Indramayu, on September 20, 1975. Apart from writing, he is also a Lecturer at the University of Muhammadiyah Makassar. He has been published in national and international journals, so scopus, and many books. Meanwhile, the education and training Training of Trainer (TOT) at BNSP in 2020, Implementation of Construction Work Contracts at BNSP in 2020, Preparation of Goods/Services Procurement Contracts at BNSP in 2020, International Training of Trainers (TOT) at IPB-KAN in 2021, BNSP Training of Trainers (TOT) at LPKN-Pelatinas in 2021, Management of BNSP Training Institutions at LPKN -Platinas in 2021, BNSP Distance Training Methodology at LPKN-Pelatinas in 2021, Certified International Quantitative Research (CIQnR) at Quantum HRM International_KAN in 2021, Certified International Qualitative Research (CIQaR) at Quantum HRM International_KAN in 2021,

eureka media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI
EC00202419336

ISBN 978-623-120-356-4
9 786231 203564

BUKU AJAR
DASAR – DASAR ILMU POLITIK

A. Junaedi Karso

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

BUKU AJAR
DASAR – DASAR ILMU POLITIK

Penulis : A. Junaedi Karso

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Ayu May Lisa

ISBN : 978-623-120-356-4

No. HKI : EC00202419336

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.
Bismillahirohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan "Buku Ajar Dasar-Dasar Ilmu Politik".

Kami mohon maaf beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan nama, kesalahan referensi, kesalahan dalam kutifipan atau salah menorehkan sumber-sumber terkait buku ini. Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutif dari berbagai sumber baik. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga "Allah SWT" membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Nasrun Minallah Wa Fathun Qarib
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB 1 PERTEMUAN PERTAMA KONSEP DASAR ILMU POLITIK **1**
A. Pendahuluan 1
B. Konsep Dasar Ilmu Politik 3
C. Konsep Dasar Sistem Politik 5
D. Pengertian : Input tuntutan dan Input Dukungan Input : Tuntutan 9
E. Input : Dukungan 11
F. Mekanisme Dukungan 13
G. Budaya Politik 16
BAB 2 PERTEMUAN KEDUA SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK **28**
A. Pendahuluan 28
B. Analisa Politik Indonesia Era Orde Lama 36
BAB 3 PERTEMUAN KETIGA PARTAI POLITIK DAN KELOMPOK KEPENTINGAN **48**
A. Partai Politik 48
BAB 4 PERTEMUAN KE EMPAT RUANG LINGKUP ILMU POLITIK **60**
A. Pendahuluan 60
B. Tipe-tipe Sistem Pemerintahan 61
C. Perkembangan Sistem Politik di Indonesia 62
BAB 5 PERTEMUAN KE LIMA RUANG LINGKUP ILMU POLITIK **65**
A. Pendahuluan 65
B. Lingkup Kekuasaan 66
C. Sistem Politik Atau Negara 67
D. Kesimpulan 68
BAB 6 PERTEMUAN KE ENAM PENDEKATAN DALAM ANALISIS SISTEM POLITIK **70**
A. Pendahuluan 70
B. Analisis Sistem Politik 71
C. Kesimpulan 74

BAB 7 PERTEMUAN KE TUJUH INPUT, OUTPUT, DAN LINGKUNGAN DALAM SISTEM POLITIK 76
A. Input 76
B. Output 79
C. Lingkungan 80
D. Kritik Terhadap Analisis Sistem Politik David Easton 84
E. Kesimpulan 85
BAB 8 PERTEMUAN KE DELAPAN PENDEKATAN *STRUKTURAL FUNGSIONAL GABRIEL ALMOND* 86
A. Sistem Politik, Lingkungan, Dan Kapabilitas 86
B. Sistem Dan Lingkungan: Suatu Pendekatan Ekologis 89
C. Kapabilitas Sistem Politik 92
D. Kesimpulan 93
BAB 9 PERTEMUAN KE SEMBILAN *ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONAL* DALAM SISTEM POLITIK 95
A. Pendahuluan 95
B. Sosialisasi Politik 99
C. Kesimpulan 102
BAB 10 PERTEMUAN KESEPULUH POLITIK ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA 104
A. Pendahuluan 104
B. Islam Politik dalam Konstalasi Politik Nasional 106
C. Agenda Islam Politik ke Depan 114
D. Kesimpulan 115
BAB 11 PERTEMUAN KE SEBELAS POLITIK ISLAM DI INDONESIA 118
A. Persepsi Responden Jika Ada Larangan Terkait Politik Dinasti di Indonesia 118
B. Pemikiran Politik Islam Abad Modern 123
C. Pemikiran Politik Kontemporer 125
D. Kesimpulan 142

BAB 12 PERSEPSI LARANGAN PRAKTIK POLITIK DINASTI 144
A. Persepsi Responden Jika Ada Larangan Terkait Politik Dinasti di Indonesia 144
B. Isu Dinasti Politik Mencuat Jelang Pemilu 146
BAB 13 PERTEMUAN KE TIGA BELAS PULAU JAWA BATTLEGROUND, ARENA PERSAINGAN POLITIK TERBESAR PEMILIHAN UMUM 2024 151
A. Jawa Jadi Battleground Pemilihan Umum 2024 151
B. Tren Jawasentris Pemilihan Umum 2024 158
C. Basis Pemilih Presiden di Pemilu 2024 182
D. Kesimpulan 192
BAB 14 PERTEMUAN KE EMPAT BELAS DASYATNYA MONEY POLITIK DALAM PERTARUNGAN PEMILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA 2024 194
A. Dasyatnya Money Politik Dalam Pemilu 2024 194
B. Politik Uang Menciptakan Peradaban K otor di Pemilu 2024 196
C. Teori Pertukaran 200
D. Partai Pendukung dan Potensi Kecurangan di Pemilihan Presiden 2024 205
E. Gerakan Kekuatan Politik Uang di Area Kekuasaan 214
F. Kesimpulan 219
DAFTAR PUSTAKA 222
TENTANG PENULIS 231

BAB 1

PERTEMUAN PERTAMA KONSEP DASAR ILMU POLITIK

A. Pendahuluan

Ilmu politik adalah salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada. Sejak orang mulai hidup bersama, masalah tentang pengaturan dan pengawasan dimulai. Sejak itu para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut batasan penerapan kekuasaan, hubungan antara yang memerintah serta yang diperintah, serta sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan tentang pengaturan dan pengawasan[1].

Ilmu politik diawali dengan baik pada masa Yunani Kuno, membuat peningkatan pada masa Romawi, tidak terlalu berkembang di Zaman Pertengahan, sedikit berkembang pada Zaman Renaissance dan Penerangan, membuat beberapa perkembangan substansial pada abad 19, dan kemudian berkembang sangat pesat pada abad 20 karena ilmu politik mendapatkan karakteristik tersendiri.

Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai Negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M. seperti dalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lainnya. Di beberapa pusat kebudayaan Asia seperti India dan Cina, telah terkumpul beberapa karya tulis bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul dalam kesusasteraan Dharmasatra dan Arthasastra, berasal kira-kira

[1] Awang Darumurti (2018), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h.4-6

BAB 2

PERTEMUAN KEDUA SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK

A. Pendahuluan

Dalam sebuah sistem politik, terdapat dua struktur politik yang menjalankan sistem politik di sebuah negara. Dua struktur politik tersebut adalah supra struktur politik dan infra struktur politik. Untuk lebih jelasnya masing masing struktur tersebut akan dibahas berikut ini:

1. Infra Struktur Politik

Infrastruktur politik[7] sering disebut sebagai bangun bawah politik atau mesin politik informal atau atau mesin politik masyarakat yang terdiri berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan sosial, ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan-kesamaan lainnya. Pengelompokan infrastruktur politik yang palig nyata dalam kehidupan modern, misalnya :

a. Partai Politik, merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki nilai, orientasi, dan cita-cita yang sama, dengan tujuan mendapatkan kekuasaan politik dengan cara yang konstitusional, seperti melalui pemilihan umum.

[7] Awang Darumurti (2018), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h.25

BAB 3

PERTEMUAN KETIGA PARTAI POLITIK DAN KELOMPOK KEPENTINGAN

A. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Carl friedrich dalam (Surbakti : 1999 : 116), memberi batasan mengenai partai politik , yaitu sekelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materil dan idiil kepada para anggotanya. Sementara itu, Soltau dalam (Surbakti : 1999 : 116), juga memberikan definisi partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.

Dari uraian tersebut di atas dapat kita rumuskan pengertian partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan

BAB 4

PERTEMUAN KE EMPAT SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN INDONESIA

Sistem politik dengan sistem pemerintahan itu berbeda loh, tapi sebelum kita bahas perbedaannya, kita bakalan bahas dulu nih pengertian sistem, pengertian politik dan juga pengertian dari sistem politik[10] itu sendiri.

A. Pendahuluan

Jadi, sistem merupakan kumpulan dari bagian-bagian, dimana setiap bagian memiliki fungsi masing-masing yang saling berkaitan. Apabila 1 fungsi rusak maka akan sangat mempengaruhi bagian-bagian lainnya. Sedangkan politik merupakan taktik atau strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 3 trik pokok politik yaitu; kewenangan, kekuasaan dan kepentingan. Dari pengertian sistem dan politik diatas dapat disimpulkan bahwa sistem politik merupakan kumpulan dari bagian-bagian yang memiliki fungsi untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Adapun perbedaan antara sistem politik dengan sistem pemerintahan ialah:

Sistem politik adalah strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan suatu negara sedangkan sistem pemerintahan adalah pelaku yang melaksanakan strategi tersebut. nah dari sini

[10] https://hi.unida.gontor.ac.id/ perbedaannya pengertian politik dan sistem politik, diakses pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 09.11 WIB.

BAB 5

PERTEMUAN KE LIMA RUANG LINGKUP ILMU POLITIK

A. Pendahuluan

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat[11]. Pada kodratnya ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah politik politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya. Karena manusia adalah inti utama dari politik, maka apapun alasannya pengamatan atau telaah politik tidak begitu saja meninggalkan faktor manusia. Dikemukakan Anton H. Djawamaku (1985: 144) : "bahwa pribadi seseorang manusia adalah unit dasar empiris analisa politik". Dalam kehidupan masyarakat istilah "politik" mula pertamanya dikenal pada masa Plato dalam bukunya yang berjudul "Politeia" yang pula dikenal dengan istilah "Republik" (Deliar Noer, 1982: 11-12), dan selanjutnya berkembang melalui karya Aristoteles, yang dikenal dengan "Politica". Karya Plato maupun Aristoteles ini dipandang sebagai titik pangkal pemikiran politik dalam sejarah perkembangannya, di mana hal itu dapat diketahui bahwa "politik" merupakan istilah dipergunakan sebagai konsep pengaturan masyarakat, sebab

[11] Ira Gamurti, Latifa Hanum Siregar, Ruang Lingkup Ilmu Politik dan Negara, Jurnal Mahasiswa Karakter BangsaVol. 1 No.1 Maret Tahun 2021, h.34-35

BAB 6

PERTEMUAN KE ENAM PENDEKATAN DALAM ANALISIS SISTEM POLITIK

A. Pendahuluan

Membahas mengenai sistem politik, yaitu David Easton dan Gabriel Almond. Dalam modul ini akan dijelaskan mengenai latar belakang pemikiran dalam analisis sistem politik, masalah input dan output dalam sistem politik, lingkungan dalam sistem politik, dan juga akan dibahas secara singkat mengenai komunikasi dalam sistem politik .

Modul ini pertama kali membahas mengenai pemikiran Easton mengenai sistem politik yang kemudian dilanjutkan dengan pemikiran Almond, terkait dengan pemikiran Almond mengenai pendekatan struktural fungsional.

Easton mengamati kehidupan politik sebagai suatu jalinan interaksi tingkah laku manusia sebagai suatu sistem. Adapun unit dalam sistem politik merupakan tindakan-tindakan yang ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Input dalam sistem politik dapat berupa tuntutan (demand) dan dukungan (support) yang setelah melalui proses konversi akan berubah menjadi output (keputusan atau kebijakan). Output yang dihasilkan setelah melalui proses konversi, setelah ada umpan balik (feed- back) ke lingkungan dapat menghasilkan input baru.

Pembahasan pemikiran Almond akan dimulai dari penjelasan mengenai pendekatan struktural fungsional, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pengertian sistem. Input, output, dan lingkungan juga akan

BAB 7

PERTEMUAN KE TUJUH INPUT, OUTPUT, DAN LINGKUNGAN DALAM SISTEM POLITIK

A. Input

Input terdiri atas tuntutan (*demands*) dan dukungan (*support*). Perlu adanya manajemen bagi *demands*. Kelebihan *demands* akan mengakibatkan beban berlebihan (*overload)* yang akan mengganggu stabilitas sistem. Perlu ada kontrol terhadap *demands*, baik melalui institusi, budaya maupun struktural *gatekeepers.* Selain *demands*, suatu sistem membutuhkan dukungan. Dukunganlah yang menentukan *demands* mana yang patut untuk diterima dan diproses lebih lanjut. Dukungan dapat didasari atas ideologi, budaya maupun nasionalisme. Dukungan juga dapat timbul karena adanya konflik dan ancaman[13].

Dalam sistem politik, *input* diperlukan sebagai sumber energi dalam sistem politik. Masyarakat dengan beragam kebutuhan, tingkat pendidikan, kesehatan, pelayanan, dan sebagainya memerlukan pemenuhan kepuasan dari sistem. Tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, ada kebutuhan yang dengan mudah dipenuhi, namun ada pula kebutuhan yang dalam pemenuhannya memerlukan sumber daya dan perhatian khusus. Dari semua kebutuhan tersebut sering kali tidak dapat dipenuhi karena tuntutan-tuntutan yang ada tidak terorganisir secara baik sehingga tidak sampai ke

---

[13] Drs. Toto Pribadi, Ali Muhyidin, S.Ip, ISIP4213/ Modul 1 Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik, h.1.8-1.4

BAB 8

PERTEMUAN KE DELAPAN
PENDEKATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL
GABRIEL ALMOND

A. Sistem Politik, Lingkungan, Dan Kapabilitas

Pendekatan struktural fungsional merupakan alat analisis yang diperlukan untuk membahas sistem politik sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia. Dengan demikian, sistem politik merupakan bagian dari subsistem dari sistem kehidupan manusia[14].

Analisis pendekatan struktural fungsional ini dimulai dengan penjelasan mengenai sistem politik sebagaimana diperkenalkan oleh Gabriel Almond. Dalam teori perbandingan politik, Almond menerapkan ide dasar dari Talcott Parsons dengan menganggap bahwa suatu sistem politik merupakan kumpulan dari peranan-peranan yang saling berinteraksi. Talcott Parsons mengembangkan apa yang disebut *grand theory* (teori besar) dalam sosiologi yang lazim disebut sebagai *Fungsionalisme Struktural*. Salah satu teori dasar Parsons menganggap bahwa masyarakat sebagai suatu sistem dengan bagian- bagian yang saling bergantungan (*interdependen*). Setiap bagian dari sistem sosial ini memiliki fungsi-fungsi sendiri menurut cara-cara *division of labor* (pembagian kerja), dan secara bersama-sama mendukung bekerjanya sistem tersebut. Sistem sosial ini bekerja secara integratif dan melalui pertukaran-

[14] Drs. Toto Pribadi, Ali Muhyidin, S.Ip, ISIP4213/ Modul 1 Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik, h.1.16-1.21

BAB 9

PERTEMUAN KE SEMBILAN
ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONAL DALAM SISTEM POLITIK

A. Pendahuluan

Dalam menjelaskan teori struktural fungsional, Almond menilai bahwa setidaknya terdapat empat ciri dalam semua sistem politik. Empat ciri inilah yang kemudian menjadi dasar dari teorinya adalah sebagai berikut .

1. Sistem politik memiliki struktur dan lembaga politik. Dalam masyarakat yang paling sederhana sampai dengan masyarakat yang paling modern memiliki struktur dan lembaga politik yang dapat diperbandingkan sesuai dengan tingkat dan bentuknya.
2. Sistem politik menjalankan fungsi yang sama walaupun frekuensinya berbeda. Perbedaan frekuensi ini terjadi karena perbedaan struktur. Fungsi dan struktur sistem politik pun dapat diperbandingkan, mengenai bagaimana proses berjalannya dan proses penyelenggaraannya.
3. Struktur politik menjalankan fungsi tertentu. Betapa pun khusus fungsi dari sistem politik, ia akan dapat bersifat multifungsi. Dengan demikian, sistem politik dapat diperbandingkan menurut tingkat kekhususan fungsi dalam struktur tersebut.
4. Sistem politik merupakan sistem campuran apabila dilihat dari segi budaya. Hal ini berarti tidak ada struktur politik dan kebudayaan yang paling modern dan paling tradisional karena keduanya hanya bersifat relatif saja.

BAB 10

PERTEMUAN KESEPULUH POLITIK ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Gerakan politik Islam di Indonesia[15] senantiasa menarik untuk dianalisis baik oleh ilmuwan politik dalam negeri maupun Asing. Intelektual politik Indonesia antara lain Nazaruddin Sjamsuddin, Syafi'i Maarif, Deliar Noor. Sedangkan peneliti politik asing yang tertarik dengan gerakan politik Islam di Indonesia antara lain Herbert Feith, Geertz, J. Benda, Karl Jacson, William Liddle, dan Hiroko Horikosi. Ketertarikan ilmuwan politik tersebut senantiasa berawal dari beberapa asumsi antara lain: pertama, Islam politik Indonesia berbeda pola gerakannya dengan Islam di berbagai Negara Islam. Islam politik Indonesia lebih menerima demokrasi tetapi kental dengan budaya lokal. Kedua, Islam sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat, sehingga memiliki power politik yang cukup besar. Dan Ketiga, Islam politik memiliki serentetan sejarah perjuangan dan perlawanan.

Secara makro eksistensi Islam politik dalam pembangunan politik bangsa tidak dapat dikesampingkan sebagaimana dikatakan peneliti senior LIPI, Taufik Abdullah

---

[15] Fauzan Ali Rasyid, Politik Islam Dan Demokrasi di Indonesia, HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah, IX, 2 (Desember 2008), h.76-83

BAB 11

PERTEMUAN KE SEBELAS POLITIK ISLAM DI INDONESIA

A. Persepsi Responden Jika Ada Larangan Terkait Politik Dinasti di Indonesia

Pemikiran Politik Islam telah berkembang sejak periode klasik, pertengahan, modern hingga kontemporer. Masing-masing pemikir politik Islam dalam tiap periode mempunyai pandangan yang unik sesuai pengalaman mereka berinteraksi dengan pemerintahan pada masanya. Dari para pemikir tersebut, umat Islam mendasarkan teori dan praktik politiknya hingga kini[16].

Runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani pada tahun 1924 serta kolonialisme yang menimpa dunia Islam pada abad ke-18-20 selain memberikan dampak negatif berupa runtuhnya peradaban politik Islam, juga memberi dampak positif dengan membuat kaum Muslimin dapat merumuskan kembali jati dirinya, termasuk pemikiran politik Islam. Krisis kekhalifahan menjadikan umat Islam lebih mengkaji gagasan negara Islam sebagai pengganti negara kekhalifahan yang nampaknya sulit untuk dihidupkan kembali.

Pasca sekularisme di Turki dan kejatuhan rezim di beberapa negara Arab melalui Arab Spring, muncullah fenomena post-Islamisme. Dawam Raharjo (Kompas,

---

[16] Muhammad Zulifan, Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini, Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (2) (2016) , h.172

BAB 12

PERTEMUAN KE DUA BELAS LARANGAN PRAKTIK POLITIK DINASTI

A. Persepsi Responden Jika Ada Larangan Terkait Politik Dinasti di Indonesia

Pandangan publik terbelah soal diskursus larangan politik dinasti di Indonesia. Ini selaras dengan temuan survei Litbang Kompas bertajuk Gibran dan Polemik Dinasti Politik edisi Oktober 2023[27].

[27] https://databoks.katadata.co.id/profile/nabilah-muhamad, Larangan Praktik Politik Dinasti, Bagaimana Publik Memandangnya, diakses pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 21.55 WIB

BAB 13

PERTEMUAN KE TIGA BELAS
PULAU JAWA BATTLEGROUND, ARENA PERSAINGAN POLITIK TERBESAR PEMILIHAN UMUM 2024

A. Jawa Jadi Battleground Pemilihan Umum 2024

1. Jawa Menjadi Medan Pertempuran Paling Sengit pada Pemilu 2024

Pulau Jawa menjadi medan pertempuran paling sengit antara kandidat calon presiden (capres) dan partai politik[30]. Mereka semua mengharapkan suara optimal di wilayah padat penduduk ini. Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa mencapai 154,28 juta atau sekitar 56 persen dari total populasi tahun 2022 sebanyak 275,7 juta. Sementara dari jumlah populasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan sebanyak 204,8 juta daftar pemilih tetap (DPT), dengan jumlah 56,3 persen atau 115,37 adalah pemilih yang tinggal di Pulau Jawa. Jika melihat riwayat Pemilu 2019 lalu, Pulau Jawa adalah battleground yang cukup sengit antara pendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, melawan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin[31].

---

[30] https://kabar24.bisnis.com/read/20231127/15/1718336/jawa-jadi-battleground-para-capres-di-kampanye-pilpres-2024, diakses pada tanggal 24 Desember 2023, pukul 13.01 WIB.

[31] Karso, A.Junaedi 2023, Mengukur Peta Pertarungan Kekuatan Politik Di Pulau Jawa, Netralitas Apartur Negara Pada Pilpres 2024, Ketimpangan Ekonomi Jawa Barat Dibawah Kepemimpinan Ridwan Kamil, h.20-26

BAB 14

PERTEMUAN KE EMPAT BELAS DASYATNYA MONEY POLITIK DALAM PERTARUNGAN PEMILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA 2024

A. Dasyatnya Money Politik Dalam Pemilu 2024

Gegap gempita penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tersisa hitungan beberapa bulan ke depan[41]. Tak hanya pemilihan presiden dan wakil presiden, masyarakat juga memilih calon anggota legislatif tingkat DPR, DPD dan DPRD tingkat provinsi serta kabupaten/kota yang bakal digelar 14 Februari 2024 mendatang. Para peserta mempersiapkan kampanye agar meraih jabatan politik

1. Politik Uang Tantangan Besar Pemilu 2024

Politik uang menjadi salah satu ancaman serius Pemilu serentak tahun 2024 mendatang[42]. Politik uang tidak lagi antara peserta dan pemilih, tetapi merambah ke penyelenggara pemilu.

Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo, saat menjadi narasumber dalam webinar Politik Uang: Potensi, Pencegahan, dan Penindakan pada Kamis (9/2/2023).

---

[41] Karso, A.Junaedi 2023, Mengukur Peta Pertarungan Kekuatan Politik Di Pulau Jawa, Netralitas Apartur Negara Pada Pilpres 2024, Ketimpangan Ekonomi Jawa Barat Dibawah Kepemimpinan Ridwan Kamil, h.76-78

[42] https://dkpp.go.id/ Ratna Dewi: Politik Uang Tantangan Besar Pemilu 2024, diakses pada tanggal 24 Desember 2023, pukul 16.22 WIB

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.Junaedi Karso 2023, Mengukur Peta Pertarungan Kekuatan Politik Di Pulau Jawa, Netralitas Apartur Negara Pada Pilpres 2024, Ketimpangan Ekonomi Jawa Barat Dibawah Kepemimpinan Ridwan Kamil, Penerbit Cv.Eureka Media Aksara- Purbalingga

Abdullah, T. (1974). Islam di Indonesia, Jakarta: Tinta Mas.

Abdullah, T. (1987). Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia, Jakarta: LP3ES,

Ahmad, A. M. (1978). Al-Fikr al-Siyasi Li al-imam Muhamamd Abduh. al-Maiat al Misriyyat al –Ammat li al-Kitab.

Al-Attas, S. M. A. N., Djojosuwarno, K., & Mahzar, A. (1981). Islam dan Sekularisme. Pustaka. Al-Faruqi, I. I. R., & Lubis, T. (1984). Islamisasi Pengetahuan. Pustaka.

Al-Ghazali (1320 H). Al-Iqtishad fi al-I'tiqad. Kairo: Tanpa Penerbit.

Ali, F. (1986). Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern, Jakarta: Gramedia.

Al-Maududi, A. A'la. (1995). Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam. Diterjemahkan oleh Hikmat, Asep.Bandung: Mizan.

al-Maududi, Abul 'Ala (1996). Khilafah dan Kerajaan, terjemah oleh Muhammadal-Baqir dari al-Khilafah wa al-Mulk. Mizan.

Al-Mawardi. (Tanpa Tahun) al-Ahkam al- Sulthaniyah. Dar al-Fikr.

Almod, Gabrield and James S. Coleman. (1960). *The Politics of Developing Area*. Princeton: Princeton University Press.

Almond, Gabriel A. & James S. Coleman. 1970,The Politics of the Developing Areas. NewYersey : Princeton.

Arkoun, M. (1994). Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan danJalan Baru. INIS.

Ash-Shiddieqy, H. (1969). Asas-asas Hukum Tatanegara Menurut Syariat Islam. Matahari Masa.

Azhar, M. (1997). Filsafat Politik, Perbandiangan Islam dan Barat. RajaGrafindo Persada.

Azra, A. (1995). Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Melacak Akar-Akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia, Bandung: Mizan.

Azra, A. (1999). Renaisans Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Benda, H.J. (1980). Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang, Jakarta: Pustaka Jaya.

Berita dan Pendapat, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Perss. Ingleson, J. (1983). Jalan ke Pengasingan, Jakarta: LP3ES.

Boland, B.J. (1985). Pergumulan Islam di Indonesia, Jakarta: Grafiti.

Bruinessen, M.V. (1995). Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia, Bandung: Mizan.

Budiardjo, Miriam. (1992). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Cristiadi, J. (200). Kompas, 8 Januari 2008

Crouch, H. (1986). Militer dan Politik Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan. Emerson, D.K. (2001). Indonesia Beyond Soeharto, Jakarta: Gramedia.

Djawamaku,H.Anton. "Dialektika Struktur danKultur dalam Proses Pembaharuan Politik Order. Baru".Analisa. 1984-1988. Effendi,Djohan.

Drs. Toto Pribadi, Ali Muhyidin, S.Ip, ISIP4213/ Modul 1 Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik

Easton, David. (1984). *Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik*. Jakarta: Bina Aksara. Easton, David. (1992). *Aproaches to The Study of Politics*. New York: Macmillan Publishing Company.

Effendi, B. (1998). Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Paramadina.

Erawan, M. (1991). Paguyuban Pasundan Di Tengah-Tengah Kancah Perjuangan Bangsa, Bandung: Mandalawangi.

Erawan, M. Dkk. (2000). Paguyuban Pasundan Kiprah Perjuangannya dari Zaman ke Zaman (1914-2000), Bandung: PB Paguyuban Pasundan.

Esposito, J. L. (1996). Ancaman Islam Mitos atau Realitas? Mizan.

Feith, H. (1986). Pemikiran Politik Indonesia: 1945-1965, Jakarta: LP3ES.

Geertz, C. (1989). Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, cet III, Jakarta: Pustaka Jaya.

Hadaad, Ismid (ed.). (1981). *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial*. Jakarta: LP3ES. Mas`oed, Mohtar dan Colin MacAndrews. (1991). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Haikal, M. H. (1993). Pemerintahan Islam. Pustaka Firdaus.

Heywood, Andrew. (2000). Key Concepts in Politics. Hampshire: Palgrave.Heywood, Andrew. (1997). Politics. Hampshire: Palgrave.

Huntington, S.P (1996). Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia, diterjemahkan oleh M. Sadat Ismail, Yogyakarta: Qalam. Ikatan Perss Mahasiswa Indonesia, (1972). Pemilihan Umum 1971: Seri

Huwaidi, F. (1996). Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat, terjemahan dari al-Islam wa al-Dimuqratiyah. Mizan.

Kadi, S. (2000). TNI-AD Dahulu, Sekarang dan Masa Depan, Jakarta: Grafiti. Kurasawa, A. (1985). Mobilisasi dan Kontrol, Jakarta: Gramedia.

Kadir, A. Gau. 2014. "Dinamika Partai Politik di Indonesia." Sosiohumaniora, Volume 16 No. 2 134.

Kamali, M. H. (1996). Kebebasan Berpendapat dalam Islam. Mizan.

Kamil, S. (2002). Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis. GayaMedia Pratama.

Kamil, S. (2013). Pemikiran Politik Islam Tematik, Agama dan Negara. Kencana Predana Media Group.

Khan, Q. (1983). Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah. Pustaka.

Komara, Endang. 2015. "Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi." SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal 119-120.

Koran Kompas, 22 Juni 2016. Opini "Post-sekularisme dan Post-Islamisme" oleh M. Dawam Rahardjo.Muhtadi, B. (2012). Dilema PKS: Suara dan Syariah. KPG.

Ma'arif, A. S. (1985). Islam dan Masalah kenegaraan, Studi Tentang Percaturan Politik dalam Konstituante, Jakarta: LP3ES.

Ma'arif, A. S. (1988). Islam dan Politik Indonesia pada Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.

Mas'oed, M. (1989). Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971, Jakarta: LP3ES.

Muhaimin, Y. (1982). Perkembangan Militer dalam Politik Indonesia 1945-1966

Murtopo, A. (1970). Strategi Politik, Jakarta: CSIS.

Murtopo, A. (1970). Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun, Jakarta: CSIS.

Nadrilun. 2012. Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia. Jakarta Timur: Balai Pustaka.

Nasution, H. dkk (2003). Eksikloped Islam. Ikhtiar Baru Van Houve.

Niel, R. Van (1984). Munculnya Elit Modern Indoensia, Jakarta: Pustaka Jaya. Noor, D. (1987). Partai-Partai Islam di Pentas Nasional, Jakarta: Grafiti.

Noer, D. (1983). Pengantar ke PemikiranPolitik. Rajawali.

Noer, Deliar. 1983. Pengantar ke Pemikiran Politik. Jakarta : Rajawali.

Noor, D. (1980). Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES. Notosusato, N. (ed). (1985). Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969, Jakarta: PN Balai Pustaka.

Pulungan, J. S. (1994). Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. RajaGrafindo Persada.

Pulungan, J. S. (1994). Prinsip-prinsipPemerintahan dalam Piagam Negara Madinah ditinjau dari Pandangan Al- Quran. Raja Grapindo Persana.

Qaradhawi, Y. (1997). Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah. Pustaka Al-Kautsar.

Rahman, F. (1982). Islam dan Modernitas, tentang Transformasi Intelektual (terj.). Pustaka.

Rais, A. (1987). Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta. Mizan.

Rauf, Maswadi dan Mappa Nasrun (eds.). (1993). *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia.

Rauf, Maswadi. (2000). *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: DirjenPendidikan Tinggi Diknas.

Rendy Adiwilaga, dkk. 2018. Sistem Pemerintahan Indonesia. Sleman: Penerbit Deepublish.

Ridha, R. (1341H). al-Khilafah au al-Imamah al-udzma. Al-Manar.

Ruhenda, dkk. 2020. "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia." Journal of Governance and Social Policy Volume 1, Issue 2 62-64.

Sjamsuddin, Nazaruddin, Toto Pribadi, dan Zulkifli Hamid. (1995). *Sistem PolitikIndonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Syadzali, M. (1993). Islam dan Tatanegara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. UI-Press.

Taimiyah, Ibnu. (Tanpa Tahun). Al-Siyasah al-Syariah. Kairo: Dar al-Kutub al- Arabi.

Thaba, A.A. (1986). Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru, Jakarta: Gema Insani Press.

Umar, M. (2004). Islam dan Demokrasi diIndonesia: Kemenangan Abangan danSekuler. INSED.

Winters, J.A. (1999). Dosa-Dosa Politik Orde Baru, Jakarta: Djambatan. Woodward, M.R. (1999). Islam Jawa, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Yulianto, A. (2000). Hubungan Sipil-Militer Pasca Orde Baru, Jakarta: Rajawali Press.

Zainuddin, A. R. (1992). Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Ibnu Khaldun.Gramedia.

Jurnal

Fauzan Ali Rasyid, Politik Islam Dan Demokrasi di Indonesia, HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah, IX, 2 (Desember 2008), h.75-85

Ira Gamurti, Latifa Hanum Siregar, Ruang Lingkup Ilmu Politik dan Negara, Jurnal Mahasiswa Karakter BangsaVol. 1 No.1 Maret Tahun 2021, h.33-36

Muhammad Zulifan, Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam ProsesPolitik Terkini, Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (2) (2016) 171-195

Online

http://www.kpu.go.id/koleksigambar/952014_ Perolehan_suara_parpol.pdf, diakses kembali pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 21.25 WIB.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/pilka da / 15/12/14/nzb8bk361-ini-parpol-yang-calonnya-mera jai-hasil-pilkada, diakses kembali pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 21.27 WIB.

http://www.kpu.go.id/koleksigambar/952014_ Penetapan_Hasil_Pileg.pdf, diakses kembali pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 21.26 WIB.

https://databoks.katadata.co.id/profile/nabilah-muhamad, Larangan Praktik Politik Dinasti, Bagaimana Publik Memandangnya, diakses pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 21.55 WIB

https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur, Isu Dinasti Politik Mencuat Jelang Pemilu, Bagaimana Tanggapan Warga, diakses pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 21.57 WIB

https://databoks.katadata.co.id/profile/adi-ahdiat, Ini Daftar Tokoh Terkait Politik Dinasti menurut Warganet, diakses pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 22.00 WIB

https://kabar24.bisnis.com/read/20231127/15/1718336/jawa-jadi-battleground-para-capres-di-kampanye-pilpres-2024, diakses pada tanggal 24 Desember 2023, pukul 13.01 WIB.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221027091219-617-865967/jawa-masih-jadi-kunci-di-pilpres-2024, diakses pada tanggal 24 Desember 2023, pukul 13.11 WIB.

https://databoks.katadata.co.id/index.php/profile/adi-ahdiat, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Berdasarkan Pulau/Kawasan, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 23.15 WIB

https://databoks.katadata.co.id/index.php/profile/adi-ahdiat, Jumlah Pemilih Pemilu 2024 di 38 Provinsi Indonesia, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 23.18 WIB

https://databoks.katadata.co.id/index.php/profile/nabilah-muhamad, Banyak Pemilih Ganjar Pindah ke Anies dan Prabowo, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 23.25 WIB

https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur, Banyak Pemilih Ganjar Pindah ke Anies dan Prabowo, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 23.29 WIB

https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur, Anak Muda RI Lebih Suka Capres Berlatar Belakang Akademisi, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 23.31 WIB

https://databoks.katadata.co.id/profile/erlina-f-santika, Kinerja dan Visi Jadi Faktor Utama Anak Muda Pilih Presiden-Wapres, diakses pada tanggal 23 Desember 2023

https://dkpp.go.id/ Ratna Dewi: Politik Uang Tantangan Besar Pemilu 2024, diakses pada tanggal 24 Desember 2023, pukul 16.22 WIB

Meri Carolina S, Tabah Maryanah, Fenomena Money PoliticsDan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (Tsm) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020, Jurnal Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Volume 48, No. 2, November 2022, h.143-144

Burhanudin Muhtadi. (2013). Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia : Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Parti-ID dan Patron-Klien. Jurnal Penelitian Politik, 10 No. 1, 47.

Hartaman, N., Purwaningsih, T., & Nurmandi, A. (2020). Journal of Governance,. The Aristocrats Power on Local Politic InThe Regency of Bone 2013-2018, 5 (1), 31–46. https://doi.org/https://doi.org/10.3150 6/jog.v5i1.7033

https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur, Deretan Partai Pendukung Bacapres 2024, Siapa Terbanyak, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.41 WIB

https://databoks.katadata.co.id/profile/nabilah-muhamad, Ini Pihak yang Dinilai Berpotensi Curang pada Pemilu 2024 Menurut Survei LSI, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.33 WIB

https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur, Responden Survei LSI Nilai Ganjar-Mahfud Paling Berpotensi Curang di Pemilu 2024, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.31 WIB.

https://databoks.katadata.co.id/profile/nabilah-muhamad, Praktik Politik Uang Jadi Hal yang Paling Dikhawatirkan Publik saat Pemilu, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.37 WIB

https://databoks.katadata.co.id/profile/nabilah-muhamad, Ini 5 Provinsi Rawan Politik Uang di Pemilu 2024, Maluku Utara Teratas, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.39 WIB

TENTANG PENULIS

A. Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasioal tahun 2020 adalah Legal Study Concerning Provison of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV, (Res Nulius Law Journal, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang, (Gorontalo Journal of Government and Political Study, 2019); Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar, (Jurnal MODERAT, 2019); Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar, (Journal of Government and Civil Society, 2019); Peran Humas dalam Menyebarluaskan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI, (Res Nulius Law Journal, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara lain Factor That Affect Governance of Land Administration service in Anjatan Districty, (International Jurnal of Social Science Humanities Research, 2019); dan Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District, Indramayu Regency, (IJO-International Journal of Social Science and Humanitities Research, 2019);

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia, (East African Scholar Journal of Economics, business and Management, 2019); Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand, (International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus), 2020); Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Pierching Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia, (Journal L Sociale, 2020); Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro Bombang, Pangkep Regency, (Journal La Bisecoman, 2020); Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports, (South Asian Research Journal of Humanitues Social Sciences, 2020); Government Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia, (East African Scholar Journal of Education and Literature, 2020); Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets, (Journal La Sociale, 2020); The Effect of Implemeting Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare, (International Journal of Mechanical and Production engimeering Research and Development (IJMPERD) (Scopus), 2020); Prespective of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema Lex, (Artech Journsl of Art and Socisl Sciences (AJASS), 2020); Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective, (IAR Journal of Humanities and Social Sciences, 2020); Village Fund Management: Risks in Management of Village-Owned Enterpreses,

(Artech Journal of Current Business and Financial Affair (AJCBFA), 2020); dan Improving the Quality of Sea Transportation Licensing Service throught Digital Technology-based Losencing Service, (Solid State Technology Archives Available, 2020). Pencegahan penyalahgunaan dana badan usaha milik desa (bumdes) menuju good governance of bumdes yang berdasarkan prinsip government judgement rulehttp://jurnal.ummu.ac.id/index.php/jgoa, 2021).

Sedangkan Buku-buku yang telah di tulis antara lain: Penerapan Good Corporate Governanance (GCG) untuk Pengamanan Aset Perusahaan; Gagasan Perubahan Perizinan Transportasi Laut; Membangun Kualitaas pelayanan Administrasi Pertanahan; Perkawinan Campuran & Kesejahteraan; Risk Manajemen Good Corporate Governance Pengamanan terhadap pencurian TBS di Perkebunan berdasarkan UU Perkebunan No 39 Tahun 2014; Legalitas Perkawinan Antar Warga Negara Di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu; Pengaruh Kepemimpinan, Profesionalisme Dan Komitmen Anggota Polri Terhadap Kinerja Divisi Propam Polri; Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemda terhadap perkawinan antar warga negara di dalam pembangunan perekonomian, soal, budaya di Kabupaten Indramayu; Pengaruh Implementasi, Manajemen Pemerintahan, Terhadap Kinerja, Peran dan Fungsi Camat di Indonesia; Dasyatnya oney Politik Pilkades (Pilwu) di Indramayu; Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan, penegakan hukum dan koloborasi pemberantasan Korupsi di Indonesia; Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia; Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia yang Tangguh; Hukuman Mati Bagi Koruptor Penghisap Bantuan Sosial Untuk Rakyat Miskin Dimasa Covid-19; Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia; Perencanaan Strategik dalam Menyiapkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital 4.0; Pembangunan Transportasi Tol Laut dalam Mewujudkan Indonesia yang Makmur Menuju Poros Maritim

Dunia; Kereta Api Trans Sulawesi antara Pengguna Transportasi & Ekonomi Masyarakat; Polri di bawah Kementerian dalam Negeri antara Politik atau Pelemahan Institusi; Urgensi Kepemilikan Hak Tanah Timbul di Patimban dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Ketegasan Polri & Penegakan Hukum Dalam Membuka Tabir Hitam Kekejaman Fredy Sambo Dalam Kasus Pembunuhan Nopryansah Yoshua Hutabarat, Lintasan Pandangan Mata Yang Remang-Remang Tentang Dilema Indonesia Lumbung Sawit Dunia Versus Peran Dan Fungsi Kementerian Perdagangan RI Dalam Menanggulangi Tingginya Dan Langkanya Di Pasaran, (Membeli Minyak Goreng Via Kartu Tanda Penduduk), Seputar Linatas Kejahatan Realita Antara & Kamuplase Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Siapa Diuntung Dan Siapa Yang Buntung Penundaan Pelaksanaan Pemilu 2024 Untuk Kepentingan Rakyat Atau Cukong Dan Merupakan Pemakzulan Konsitusi, Demokrasi Di Indonesia; Kupas Tuntas Pro Kontra Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat Terkait Penudaan Pemilu 2024 Meraung Pemilihan Presiden Tahun 2024 Tetap Dilaksanakan Berdasarkan Konstitusi Indonesia; dan Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Versus Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun Di Indonesia Gula Manis Menjelang Pemilihan Umum 2024.

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free Elementary di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary One di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two di PKBMN Jakarta tahun 1996, Intermedite One di PKBMN Jakarta tahun 1998,

Intermedite Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di PKBMN Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain My Dreams Future Procurement break Through di LPKN tahun 2020, Certificate Prourement Contract Legal Expert (CPCLE) di International Frederation of Procurememt Bar Association (IFPB) tahun 2020, Certificate Procurement in Perpetice ISO di Nevi Belanda tahun 2020, Implementasi System Thinking dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, Dinamika Balcklist dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem

Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Awarness, Understanding & Implementing Quality Management System di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, New Normal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi "How to Perform While Transform" di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui Quality Assurance dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, Training of Trainer (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Certified International Quantitative Research (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, Certified International Qualitative Research (CIQaR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021.

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan – Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjaung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202419336, 28 Februari 2024
Pencipta		
Nama	:	**A. Junaedi Karso**
Alamat	:	Jl. Kebon Randu I, RT.005/RW.001, Desa Anjatan Baru, Anjatan, Indramayu, Jawa Barat, 45256
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**A. Junaedi Karso**
Alamat	:	Jl. Kebon Randu I, RT.005/RW.001, Desa Anjatan Baru, Anjatan, Indramayu, Jawa Barat 45256
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Buku Ajar Dasar-Dasar Ilmu Politik**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	26 Februari 2024, di Purbalingga
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000594697

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.